



Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

2021

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	4
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	5
A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	5
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris	5
2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan	18
3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.....	33
4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	40
5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	42
6) Rencana strategis Perusahaan	44
7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya	49
8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain.....	49
9) Pelaksanaan wewenang RUPS.....	49
10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen.....	51
11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi.....	58
B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham	59
C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	60
D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat	61

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	62
F. Penerapan Tata Kelola Investasi.....	63
G. Jumlah Penyimpangan Internal	64
H. Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya.....	65
I. Permasalahan Hukum.....	67
III. RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>)	68

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor No.73/POJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk periode tahun 2021.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Direksi

Per 31 Desember 2021 jumlah Direksi PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	Bandung Institute of Technology, Majoring in Chemical Engineering (1984)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-347/NB.11/2019 tgl. 26 June 2019	01 July 2019	5 Tahun	Indonesia	Indonesia
2.	Hajime Jodai	Direktur Pelaksana	Tokyo University, Japan (1993)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-107/NB.11/2019 tgl. 01 March 2019	01 April 2019	5 Tahun	Jepang	Indonesia
3.	Makoto Terada	Direktur	Waseda University, Japan (2000)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-61/NB.11/2019 tgl. 12 February June 2019	01 April 2019	5 Tahun	Jepang	Indonesia
4.	Nastiti Evia Lutfi	Direktur	University of Indonesia, Majoring in Human Resources (2004)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-1068/NB.11/2018 tgl. 07 December 2018	08 Februari 2019	5 Tahun	Indonesia	Indonesia

Berikut uraian pengalaman pekerjaan di bidang perasuransian anggota Direksi:

No.	Nama	Tahun	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Sancoyo Setiabudi	1992 - 1993	PT Procter & Gamble Indonesia	Senior Section Manager
		1993 - 2009	PT Zurich Insurance Indonesia	COO & Kepala Divisi
		2009 - 2013	PT Zurich Insurance Indonesia	CEO & Direktur Utama
		2013 - 2014	Professional Counsultant	Counsultant
		2014 - 2016	PT Sysco Systems Indonesia	Managing Director
		2016 - 2019	PT Asuransi FPG Indonesia	Direktur Utama
		2019 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Jakarta	Direktur Utama
2.	Hajime Jodai	1993 - 1997	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Staff
		1997 - 2002	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Osaka, Japan	Supervisor
		2002 - 2008	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Section Manager
		2008 - 2013	The Tokio Marine Europe Insurance German Branch	Manager
		2013 - 2018	The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	General Manager
		2018 - 2019	PT Asuransi Toko Marine Indonesia	Technical Advisor
		2019 - Sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Direktur
		3 Mar 2017 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Jakarta	Direktur
		1995 - 2001	Tokio Marine & Nichido Fire Ins. Co., Ltd., Tokyo Jepang	Asisten Manajer
3	Makoto Terada	2000 - 2004	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Staff
		2004 - 2007	The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd., Tokyo, Japan	Assistant Manager

		2007 - 2009	Tokio Millenium Re (TMR) Hamiton, Bermuda	Assisstant Vice President
		2009 - 2017	Tokio Marine Holdings, Tokyo, Japan	Manager
		2017 - 2019	Tokio Marine Asia, Pte.,Ltd.,	Senior Manager
		2019 - sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Jakarta	Direktur
4	Nastiti Evia Lutfi	1990 - 2002	PT Asuransi Jasa Indonesia	Staff
		2003 - 2006	PT Asuransi Jasa Indonesia	Sub-Division Head
		2007 - 2011	PT Asuransi Jasa Indonesia	Kepala Divisi
		2012 - 2013	PT Asuransi Jasa Indonesia	Kepala Cabang
		2013 - 2019	PT Asuransi Jasa Indonesia	Deputy Direktur
		2019 - Sekarang	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Direktur

Selama tahun 2021 terdapat perubahan susunan anggota Direksi, susunan anggota Dewan Direksi yang sebelumnya dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	1 July 2019	
2.	Nastiti Evia Lutfi*	Direktur	8 February 2019	
3.	Teruaki Tanaka	Direktur	17 April 2017	22 Maret 2021
4.	Hajime Jodai	Direktur	1 April 2019	
5.	Makoto Terada	Direktur	1 April 2019	

Catatan:

* Hajime Jodai diangkat sebagai Direktur Pelaksana pada 22 Maret 2021 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran

(2) Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2021, jumlah Dewan Komisaris PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Diwe Novara	Komisaris Utama	Mercubuana University (2017)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-82/NB.11/2021 February 1 st 2021	15 Maret 2021	5 tahun	Indonesia	Indonesia
2.	Philippe Vezio	Komisaris	Pantheon University, Assas Paris II (1993)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-298/NB.11/2019 tgl. 23 Mei 2019	01 Juli 2019	5 tahun	Perancis	Singapore
3.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	Colorado University (2003)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-400/NB.11/2016 tgl 2 Juni 2016	1 Juli 2016	5 tahun	Indonesia	Indonesia
4.	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	Overseas Training Center (1981)	Lihat Uraian di bawah	No. KEP-311/NB.11/2021 April 23 rd 2021	17 Mei 2021	5 tahun	Indonesia	Indonesia

Berikut uraian pengalaman pekerjaan di bidang perasuransian anggota Dewan Komisaris:

No.	Nama	Tahun	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Diwe Novara	2003 - 2007	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Staff
		2008 - 2012	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Koordinator
		2012 - 2014	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Kepala Subdivisi Klaim
		2014 - 2016	PT Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta	Kepala Unit Cabang
		2016 - 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia, Jakarta	Kepala Cabang

		2018 - 2019	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Corporate Marketing	Kepala Divisi
		2019 - 2020	PT Asuransi Jasa Indonesia, Divisi Oil & Gas	Kepala Group
		2020 - sekarang	PT Asuransi Jasa Indonesia, Business Development	Direktur
2.	Philippe Vezio	1997 - 2000	AXA Global Risks Directors & Officer, Paris, Perancis	Manager
		2000 - 2010	HCC Global Financial Products, Barcelona, Spanyol	Direktur Klaim
		2010 - 2019	HCC Global Financial Products, Barcelona, Spanyol	Managing Director
		2019 - Sekarang	Tokio Marine Asia Pte., Ltd, Singapore	Deputy CEO
3.	Agustino Tumpal Manambos Sidabutar	1998 - 2001	ORN Computer System Pte., Ltd.	Manajer Proyek
		2001	Magnet Interactive	Coordinator
		2003 - 2006	ADT Security Services North America Inc.	Specialist
		2006 - 2010	PT Rajawali Boan Hasangapon	Director
		2012 - Sekarang	PT Prima Trinita Indonesia	General Manager
		2014 - 2016	PT Paragon Reinsurance Insurance Broker	Komisaris
		2016 - Sekarang	PT Ture Ugari Nusantara	General Manager
4.	Linda Juliana JL Delhaye	1977 - 1981	PT Asuransi Jiwa Ikrar Abadi	Supervisor
		1981 - 1983	PT Asuransi Multi Artha Guna	Assistant Manager
		1983 - 1986	PT Asuransi Multi Artha Guna	Manager Teknik
		1986 - 1992	PT Asuransi Multi Artha Guna	General Manager
		1993 - 2018	PT Asuransi Multi Artha Guna	Direktur Utama
		2018 - 2021	PT Reasuransi Maipark Indonesia	Komisaris
		2021 - present	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Komisaris Independen

Selama tahun 2021d terdapat dua perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, susunan anggota Dewan Komisaris yang sebelumnya adalah:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Sahata Lumban Tobing	Komisaris Utama	08 March 2013	15 March 2021
2.	Diwe Novara	Komisaris Utama	15 March 2021	
3.	Philippe Vezio	Komisaris	01 July 2019	
4.	Agustino Tumpal Manombas Sidabutar	Komisaris Independen	01 July 2016	
5.	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	17 May 2021	

b) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan beberapa pembatasan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak dalam satu tahun buku atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut.
- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

(2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

c) Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Hajime Jodai	Direktur Pelaksana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Makoto Terada	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Nastiti Evia Lutfi	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Diwe Novara	Komisaris Utama	Direktur	PT Asuransi Jasa Indonesia	Asuransi
2.	Philippe Vezio	Komisaris	Direktur	Tokio Marine Asia, Pte. Ltd.	Induk Asuransi

3.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	Direktur	PT Ture Ugari Nusantara	Komunikasi
4.	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	-	-	-

d) Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

(1) Direksi

No.	Nama	Jabatan	Workshop/ training/ seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	Webinar Peran Direksi dan Komisaris	OJK	9 Februari 2021	Online
			Driving Effective Risk Management from Strategy to Process	GRC Management	30 Maret 2021	Online
			4 th ASEAN Insurance Summit	ASEAN Insurance Council	26 Oktober 2021	Online
			Cambridge Judge Business School Executive Education - FinTech Innovation: Disrupting the Financial Landscape	Emeritus	28 Oktober 2021	Online
2.	Hajime Jodai	Direktur Pelaksana	ISEA Executives Development Program Webinar Series	ISEA	10 Maret 2021	Online
			TMA Asia Crisis Management Training	Tokio Marine Asia	22 September 2021	Online
			4 th ASEAN Insurance Summit	ASEAN Insurance Council	26 Oktober 2021	Online
			Risk Beyond: Journey to a new frontier 2021	IRMAPA	8-10 Desember 2021	Online

3.	Makoto Terada	Direktur	ISEA Executives Development Program Webinar Series	ISEA	12 Maret 2021	Online
			7 th AAUI International Insurance Seminar, Catastrophe Management - Harnessing Local and Global Insurance Industry	AAUI	30 April 2021	Online
			17 th Singapore International Reinsurance Conference	SIRC	15-17 November 2021	Online
			Risk Beyond: Journey to a new frontier 2021	IRMAPA	8-10 Desember 2021	Online
4.	Nastiti Evia Lutfi	Direktur	Driving Effective Risk Management from Strategy to Process	GRC	30 Maret 2021	Online
			Awareness SNI ISO 37001 dan implementasi system manajemen anti penyuapan pada sector jasa keuangan	OJK	8 April 2021	Online
			Developing Risk Intelligence	GRC Management	29-30 September 2021	Online
			Leadership Sharing Session: Pengembangan SDM di Era Digital	OJK	2 December 2021	Online

(2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Workshop/ training/ seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Diwe Novara	Komisaris Utama	Leadership Under Uncertainties	OJK	2021	Online
			Awareness SNI ISO 37001 dan implementasi system manajemen anti penyuapan pada sector jasa Keuangan	OJK	2021	Online
			Anti Korupsi Bersama KPK	KPK	2021	Online

2.	Philippe Vezio	Komisaris	The Role of Risk CRO in Risk Oversight	CRMS	10 Maret 2021	Online
3.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	Qualified Risk Governance Personnel Training	LPKMKS	18-19 Desember 2021	Online
4.	Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Independen	Digital Transformation in Financial Industry	The Indonesian Insurance Institute	7 April 2021	Online

e) Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Berikut ini adalah kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk tahun 2021.

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1.	9 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Rapat Direksi Laporan KPI Keuangan bulan Desember 2020 	(Rapat Sirkuler)
2.	1 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Rapat Direksi Rencana Pergantian Anggota Dewan Komisaris Laporan KPI Keuangan bulan Januari 2021 Laporan penunjukan dan pengunduran diri anggota Direksi Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui Laporan dari Komite 	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris mengetahui rencana Pergantian Anggota Dewan Komisaris Komisaris meminta Direksi untuk mengevaluasi hasil tahun 2020 untuk mencapai target tahun 2021 Komisaris menyarankan agar Direksi lebih memperhatikan trend penjualan mobil dan target pertumbuhan topline Komisaris meminta Direksi untuk lebih memperhatikan kemungkinan adanya permintaan biaya di muka dari klien e-commerce
3.	31 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Rapat Direksi Laporan Pengunduran Diri dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Laporan KPI Keuangan bulan Februari 2021 Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	(Rapat Sirkuler)

		5. Laporan dari Komite	
4.	28 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Laporan Tahunan 2020 3. Pengangkatan Anggota Komite Audit 4. Rekomendasi Penunjukan Auditor Eksternal untuk Laporan Keuangan tahun 2021 5. Laporan Tata Kelola Perusahaan tahun 2021 6. Laporan KPI Keuangan bulan Maret 2021 7. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris menyetujui Laporan Tahunan 2020 2. Komisaris menyetujui pengangkatan Diwe Novara sebagai anggota Komite Audit 3. Komisaris setuju untuk merekomendasikan PwC sebagai Auditor Eksternal kepada RUPS
5.	31 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Pengangkatan Komisaris Independen 3. Laporan KPI Keuangan bulan April 2021 	(Rapat Sirkuler)
6.	30 June 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Laporan Policy Inventory Project 2020 3. Laporan KPI Keuangan bulan Mei 2021 4. Laporan dari Komite 	(Rapat Sirkuler)
7.	30 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Laporan KPI Keuangan bulan Juni 2021 3. Laporan dari Komite 	(Rapat Sirkuler)
8.	31 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit 3. Laporan KPI Keuangan bulan Juli 2021 4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris menyetujui pengangkatan Linda Juliana JL Delhaye sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit 2. Komisaris menyarankan manajemen untuk memperhatikan trend e-commerce dan pergerakan merger yang dapat mempengaruhi kerja sama dengan perusahaan
9.	30 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Pengangkatan Anggota Independen Komite Audit 3. Laporan KPI Keuangan bulan Agustus 2021 4. Laporan dari Komite 	(Rapat Sirkuler) Komisaris secara Sirkuler menyetujui pengangkatan Lim Kumiawan sebagai Anggota Independen Komite Audit

10.	30 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Laporan KPI Keuangan bulan September 2021 3. Laporan Klaim Besar di Kuartal 1 dan 2 2021 4. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	(Rapat Sirkuler)
11.	30 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Jadwal Rapat Dewan untuk tahun 2022 3. Laporan Evaluasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 4. Laporan KPI Keuangan bulan Oktober 2021 5. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris menyetujui jadwal Rapat Dewan untuk tahun 2022 2. Komisaris menyarankan manajemen untuk terus memantau perkembangan UU HPP dan pengaruhnya untuk perusahaan
12.	30 December 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rapat Direksi 2. Laporan Perubahan Struktur Otorisasi dan Lini Pelaporan Perusahaan 3. Laporan KPI Keuangan bulan November 2021 6. Laporan Panduan dan Kebijakan Perusahaan yang Diperbarui 	Rapat Sirkuler

f) Frekuensi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun
(1) Rapat Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik/Video	Circular	
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama	12	0	100%
2.	Teruaki Tanaka *)	Direktur	2	0	16%
3.	Makoto Terada	Direktur	12	0	100%

4.	Nastiti Evia Lutfi	Direktur	12	0	100%
5.	Hajime Jodai	Direktur	12	0	100%

*) menjabat hingga 22 Maret 2021

(2) Rapat Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik/Video	Circular	
1.	Sahata Lumban Tobing*)	Komisaris Utama	1	1	16%
2.	Diwe Novara**)	Komisaris Utama	3	7	83%
3.	Philippe Vezio	Komisaris	4	8	100%
4.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	4	8	100%
5.	Linda Juliana JL Delhaye***)	Komisaris Independen	2	6	66%

Keterangan:

*) menjabat hingga 15 Maret 2021

***) diangkat pada 15 Maret 2021

***) diangkat pada 17 Mei 2021

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Circular	
1.	Sahata Lumban Tobing*)	Komisaris Utama	1	1	16%

2.	Diwe Novara**)	Komisaris Utama	3	7	83%
3.	Philippe Vezio	Komisaris	4	8	100%
4.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	4	8	100%
5.	Linda Juliana JL Delhaye***)	Komisaris Independen	2	6	66%

Keterangan:

*) menjabat hingga 15 Maret 2021

***) diangkat pada 15 Maret 2021

***) diangkat pada 17 Mei 2021

(4) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik/Video	Circular	
1.	Sahata Lumban Tobing*)	Komisaris Utama	0	0	0%
2.	Diwe Novara	Komisaris Utama	1	1	100%
3.	Philippe Vezio	Komisaris	1	1	100%
4.	Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	1	1	100%
5.	Linda Juliana JL Delhaye**)	Komisaris Independen	0	0	0%

Keterangan:

*) sudah tidak menjabat pada saat rapat dengan Auditor Eksternal diadakan.

***) belum menjabat pada saat rapat dengan Auditor Eksternal diadakan.

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan

- a) Pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan

Fungsi pengawasan terhadap pengendalian intern Perusahaan dijalankan oleh Departemen Audit Internal yang berada di bawah Direktur Utama berkoordinasi dengan Komite Audit; dan Departemen Manajemen Risiko yang berada di bawah Komite Pemantau Risiko.

- b) Pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan
- Fungsi pengawasan terhadap pengendalian intern Perusahaan dijalankan oleh Departemen Audit Internal yang berada di bawah Komite Audit dan Departemen Manajemen Risiko yang berada di bawah Komite Pemantau Risiko.
- (1) Departemen Audit Internal dibentuk dengan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan pengelolaan atas pengendalian di Perusahaan. Pengendalian intern adalah tanggung jawab Manajemen. Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara keseluruhan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- (a) Mengulas dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal untuk menjaga aset Perusahaan.
 - (b) Mengevaluasi keandalan dan integritas manajemen dan informasi keuangan.
 - (c) Memastikan tingkat kepatuhan atas kebijakan, prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan.
 - (d) Memberikan saran terhadap sistem pengendalian internal yang tepat dalam kapasitas sebagai konsultan.
 - (e) Melaksanakan investigasi *ad hoc* atau ulasan sebagaimana diminta oleh Komite Audit dan / atau Manajemen.
- (2) Departemen Manajemen Risiko adalah unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (a) Bertanggung jawab untuk membantu Dewan, Komite Dewan dan manajemen senior untuk mengidentifikasi risiko dalam kegiatan bisnis perusahaan
 - (b) Mengumpulkan metode pengukuran risiko
 - (c) Mengawasi penerapan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Dewan Direksi
 - (d) Mengawasi posisi risiko, per tipe risiko dan per tipe aktivitas secara keseluruhan, dan melaksanakan tes menggunakan skenario/asumsi kondisi abnormal dan tes menggunakan data historis;
 - (e) Mengulas proses manajemen risiko secara berkala;
 - (f) Mengulas proposal untuk pengembangan atau perluasan kegiatan bisnis;
 - (g) Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi perusahaan yang menggunakan model tersebut untuk keperluan internal;
 - (h) Memberi rekomendasi untuk fungsi bisnis dan operasional pada Komite Pemantau Risiko; dan
 - (i) Menyiapkan dan menyerahkan laporan profil risiko untuk Direktur Utama atau setara, atau anggota Dewan Direksi yang mengawasi fungsi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

c) Pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan

(1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi

(i) Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite

(a) Komite Investasi

Struktur Komite: Komite Investasi memiliki seorang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua yang merupakan Direktur Keuangan.
- Anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan investasi.

(b) Komite Kepatuhan

Struktur Komite: Komite Kepatuhan memiliki seorang Ketua yang dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua, seorang Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*) dan 4 (empat) orang Anggota ditambah seluruh anggota Direksi.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua yang merupakan Direktur Kepatuhan, SDM & Umum.
- Anggota lain terdiri atas anggota Direksi lainnya, seorang Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*), dan Anggota-anggota yang diangkat dari bagian-bagian terkait seperti Kepala Divisi Komersial, Kepala Divisi Klaim, Kepala Bagian Manajemen Risiko, dan Kepala Bagian Internal Audit.

Pada awalnya Komite Kepatuhan melakukan rapat setiap Triwulan, namun dengan mempertimbangkan factor efisiensi maka terhitung sejak Agustus 2019 telah dilakukan perubahan dimana rapat dilakukan dalam sebuah forum baru bernama Rapat Tata Kelola (*Governance Meeting*) dimana sebagian dari anggota Komite Kepatuhan bersama sama dengan Risk Management dan Internal Audit akan melakukan rapat dengan Direksi setiap bulan. Sedangkan rapat yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan akan dilakukan sekali setiap tahun yaitu di akhir tahun.

(c) Komite Layanan Pengaduan Pelanggan (CCSU)

Struktur Komite: Komite Layanan Pengaduan Pelanggan memiliki seorang Ketua, seorang Sekretaris dan Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua yang bertugas sebagai Koordinator dan menjabat satu level di bawah Dewan Direksi.
- Anggota yang berasal dari bagian Umum, Marketing, Klaim, dan Sistem Informasi.
- Semua Manajer Cabang dan Kantor Perwakilan.

(d) Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite: Komite Manajemen Risiko memiliki seorang ketua dan beberapa anggota dengan setengah dari jumlah dewan direksi.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko; dan
- Pejabat eksekutif terkait yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direksi atau memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko.

(ii) Tugas dan tanggung jawab komite

(a) Komite Investasi

Tugas Komite Investasi meliputi hal-hal berikut:

- Membantu Direksi menyusun kebijakan dan strategi investasi.
- Menyelenggarakan pertemuan sekurangnya satu kali dalam satu triwulan.
- Mengulas kebijakan dan strategi investasi dan mengusulkan perubahannya kepada Direksi, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- Mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan dan kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan sekurangnya satu kali dalam satu semester.
- Mengevaluasi kegiatan investasi yang dikelola oleh pihak Ketiga untuk Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi.

(b) Komite Kepatuhan

Tugas Komite Kepatuhan meliputi hal-hal berikut:

- Mengawasi dan menilai bagaimana risiko kepatuhan dikelola di Perusahaan.
- Merancang kebijakan kepatuhan dan strategi yang tepat untuk Perusahaan.
- Mempromosikan komitmen untuk patuh pada hukum, peraturan, aturan, kebijakan dan prosedur.

- Mengelola pelatihan kepatuhan untuk karyawan dan agen atau pihak terkait lainnya.
- Mengkomunikasikan kebijakan, strategi, dan implementasi kepatuhan dan memastikannya terpantau dengan baik.
- Melaporkan pengelolaan risiko kepatuhan kepada Direksi.
- Melaporkan setiap pembaruan dalam peraturan dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang hal-hal yang perlu dilakukan.
- Melakukan investigasi dan melaporkan insiden kepatuhan kepada Direksi.

(c) Komite Layanan Pengaduan Pelanggan

Tugas Komite Layanan Pengaduan Pelanggan meliputi hal-hal berikut:

- Mengevaluasi keluhan yang diterima dari pelanggan.
- Melaporkan hasil evaluasi kepada Direksi secara periodik.
- Mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka untuk memberikan peningkatan kepuasan pada pelanggan secara maksimal dan mengurangi timbulnya keluhan pelanggan.
- Ketua Komite berhak untuk menetapkan tugas masing-masing anggota komite, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan komite.

(d) Komite Manajemen Risiko

Tugas Komite Manajemen Risiko meliputi hal-hal berikut:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman untuk penerapan Manajemen Risiko
- Memperbarui dan merevisi penerapan Manajemen Risiko berdasarkan evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko; dan
- Penetapan hal-hal terkait keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

(iii) Frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Investasi

Rapat Komite Investasi dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (4 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Makoto Terada (Chairman)	4	100%
2.	Yuke Irawati	4	100%
3.	Martha Endika Sasongko	4	100%

(b) Rapat Komite Kepatuhan & Komite Tata Kelola

Rapat Komite Kepatuhan selama 2021 diadakan 1 (satu) kali adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (1 kali rapat)		Keterangan
		Jumlah Kehadiran	%	
1.	Nastiti Evia Lutfi (Chairman)	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
2.	Sancoyo Setiabudi	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
3.	Makoto Terada	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
4.	Hajime Jodai	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
5.	Aminta Ginting	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
6.	Indah Dwi Yuniati	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
7.	Edward	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
8.	Pisko Koesnodo	1	100%	Appointed as per 10/12/2019
9.	Mulyadi	1	100%	Appointed as per 10/12/2019

Sejak Agustus 2019 diadakan “Governance Meeting” yang diikuti oleh Sebagian anggota Komite Kepatuhan, bersama dengan departemen Manajemen Risiko dan Internal Audit bersama dengan Dewan Direksi.

Selama tahun 2021, Governance Meeting dilaksanakan sebanyak sebelas (11) kali:

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (11 kali rapat)		Remark
		Jumlah Kehadiran	%	
1.	Sancoyo Setiabudi	11	100%	
2.	Teruaki Tanaka	2	18%	
3.	Makoto Terada	11	100%	
4.	Hajime Jodai	11	100%	
5.	Nastiti Evia Lutfi	11	100%	
6.	Aminta Ginting (Coordinator)	11	100%	
7.	Rudolf Sirait	4	33%	
8.	Pisko Koesnodo	11	100%	
9.	Mulyadi	11	100%	

(c) Rapat Layanan Pengaduan Pelanggan

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (3 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Edward (Chairman)	4	44%
2.	Isko Dwi Indrawan	9	100%
3.	Taufik Marzuki	6	66%
4.	Dinar Ayu Novanthia	7	77%

5.	Meilissa Pramaditya Rondonuwu	8	88%
5.	Fouris Hardini	3	33%
6.	Husein Salim	7	77%
7.	Herlin Triana	6	66%
8	Siti Afifa	3	33%
9	Eka Nurlita Wahyuni	6	66%
10	Agus Nugroho	8	88%
11	Noni Budiarti	9	100%
12	Monda Siregar	8	88%
13	Kurnia Ferdian	3	33%
14	Lily Chandra	7	77%
15	Lila Delima	6	66%
16	Eka Purbasari	6	66%
17	Abadi Marenda	7	77%
18	Joni Pratama	6	66%
19	Walidi	9	100%
20	Yoga Prasetya	3	33%

(d) Risk Management Committee Meeting

Risk Management Committee meeting is conducted 4 (four) times in a year. Meeting of Risk Management Committee in the period 2021 are as follows:

No.	Name of Members Risk Management Committee	No. of meeting (6 times)	
		Attendance	%

1.	Nastiti Evia Lutfi	4	100%
2.	Makoto Terada	4	100%
3.	Mulyadi	4	100%
4.	Rudolf Siraıt	1	25%
5.	Indah Dwi Y	4	100%
6.	Hirosshi Miyamoto	1	25%
7.	Esti Handayani	4	100%
8.	Martinus Tjahjadi	1	25%
9.	Surya Paminto	3	75%
10.	Jacintha Vima	4	100%
11.	Nasuka	2	50%
12.	Yuke Irawati	4	100%
13.	Herry Adrian	4	100%
14.	Aminta GinLing	4	100%

(iv) Program kerja komite dan realisasinya.

(a) Komite Investasi

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi investasi. Realisasi: penyusunan Alokasi Aset Strategis.
- Mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setiap triwulan. Realisasi: Pertemuan dilakukan 4 kali pada tahun 2021.
- Meninjau kebijakan dan strategi investasi, dan mengusulkan perubahan kepada Direksi dan melaporkan kepada Dewan Komisaris. Realisasi: Melakukan revisi Alokasi Aset Strategis.
- Mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan dan kesesuaiannya dengan kebijakan investasi dan strategi setidaknya setiap enam bulan. Realisasi: evaluasi dilakukan setiap triwulan pada saat pertemuan Komite Investasi.

- Mengevaluasi setiap kegiatan investasi yang dikelola oleh pihak ketiga untuk Perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Realisasi: Evaluasi dilakukan secara berkala pada saat Rapat Komite Investasi. Masing-masing Manajer Investasi menyampaikan penjelasan kinerja mereka sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan untuk periode tertentu, evaluasi dan strategi yang digunakan untuk memaksimalkan hasil investasi oleh perusahaan.

(b) Komite Kepatuhan

Program kerja dan realisasi Komite Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Mengadakan pelatihan kepatuhan kepada semua karyawan dengan 11 modules. Pelatihan telah diadakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai 20 Desember 2021 yang diikuti oleh seluruh karyawan TMI menggunakan system e-learning.
- Menyusun dan meminta Pernyataan Anti Korupsi dari BOC, BOD dan seluruh karyawan di 2020 sebagai suatu bentuk kampanye peningkatan kesadaran anti korupsi, hal mana sudah direalisasikan di 2020.
- Menyelenggarakan "Compliance Day 2021" untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap kepatuhan. Compliance Day 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021.
- Memperbarui matriks pelaporan untuk tiap departemen dan memantau penyerahan laporan. Matriks laporan diperbaharui secara berkala setiap bulan.
- Mengecek dan mengulas peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Membuat ringkasan dan tindakan yang harus diambil dan mengusulkan pada Direksi.
- Memantau dan mengulas isu-isu kepatuhan di TMI. Isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan dibahas dalam setiap rapat Komite Kepatuhan dan/atau Rapat Tata Kelola.

(c) Komite Layanan Pengaduan Pelanggan

Program kerja dan realisasi Komite Layanan Pengaduan Pelanggan adalah sebagai berikut:

- Mencatat semua keluhan yang diterima dari pelanggan ke dalam system dan menyelesaikan keluhan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Mengevaluasi keluhan-keluhan pelanggan dan secara berkala memberi laporan pada Dewan Direksi dan OJK.

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penanganan keluhan kepada seluruh karyawan menggunakan system yang tersedia di perusahaan.

- Diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Komite Kepuasan Pelanggan tidak dapat mengadakan pelatihan lain untuk meningkatkan keahlian dan kualitas anggota-anggotanya.

(d) Komite Manajemen Risiko

- Memantau Rasio Kecukupan Solvabilitas. **Realisasi:** Perhitungan Solvency Adequacy Ratio dilakukan oleh Bagian Akuntansi. Manajemen Risiko akan memantaunya setiap bulan dan melaporkannya kepada Komite Manajemen Risiko setiap tiga bulan.
Risiko yang Muncul. **Realisasi:** Anggota Komite Manajemen Risiko telah memutuskan risiko yang muncul di perusahaan dan memantau setiap perkembangannya melalui rapat rutin Komite Manajemen Risiko.
Memantau Key Risk Indicator (KRI) Perusahaan. **Realisasi:** Departemen Manajemen Risiko telah membentuk KRI Non-Keuangan dan Keuangan dengan seluruh departemen terkait dan memantau hasilnya dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
Manajemen Insiden Risiko. **Realisasi:** Departemen Manajemen Risiko telah mengidentifikasi risiko siber sebagai salah satu insiden risiko. Departemen Manajemen Risiko bersama dengan anggota Komite Manajemen Risiko lainnya telah berdiskusi tentang pertanggung jawaban asuransi siber untuk TMI.

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris

(i) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite

(a) Komite Audit

Struktur Komite: Komite Audit terdiri dari seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua yang berasal dari komisaris independen atau pihak independen yang memiliki keahlian di bidang audit/keuangan/hukum/asuransi/akuntansi.
- Seorang anggota yang memiliki keahlian dan/atau pendidikan di bidang hukum atau asuransi, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan berlatar belakang hukum atau asuransi
 - b. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang hukum dan/atau asuransi
- Seorang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan dan akuntansi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi
- b. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi
- Seorang anggota yang independen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan
 - b. Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan
 - c. Tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti dari kantor akuntan publik, konsultan aktuarial, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu selama 6 (enam) bulan
 - d. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi Syariah, hukum, manajemen risiko, aktuarial, tata Kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian
 - e. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan Pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan
 - f. Mampu berkomunikasi secara efektif
 - g. Tidak memiliki kepemilikan saham terhadap perusahaan

Independensi Komite: Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite Audit harus bebas dari segala kegiatan atau layanan yang dapat mengganggu independensi; khususnya yang berisiko konflik kepentingan.

(b) Komite Pemantau Risiko

Struktur Komite: Komite Pemantau Risiko memiliki seorang Ketua dan minimum 2 (dua) orang Anggota.

Keanggotaan dan Keahlian Komite:

- Seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari Komisaris Independen
- Anggota yang didalamnya terdiri dari anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuarial; dan anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau asuransi.

Independensi Komite: Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko harus bertindak secara independen, independen dan profesional dan bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

(ii) Tugas dan tanggung jawab komite

(a) Komite Audit

- Mendorong Departemen Audit Internal untuk melaksanakan tugasnya secara independen, efisien dan efektif.
- Mengulas dan menyetujui rencana tahunan audit intern dan seluruh perubahan-perubahan yang signifikan atas rencana tersebut.
- Menyetujui piagam audit internal dan seluruh perubahan-perubahan yang signifikan atas piagam tersebut.
Menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Kepala Departemen Audit Internal.
- Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, Komite Audit atau ketua Komite Audit mengulas pencapaian dan kinerja Kepala Departemen Audit Internal, dan memberikan persetujuan atas penyesuaian gaji dan tunjangan.
- Mengulas efektivitas sistem pengendalian intern Perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi dan *whistle blowing system*.
- Mengulas hasil audit internal dan eksternal berikut tanggapan dari manajemen, serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan.
- Mengulas usulan cakupan dan pendekatan audit yang diajukan oleh auditor eksternal, termasuk koordinasi dengan Departemen Audit Internal.
- Mengulas dan memberikan penilaian terhadap independensi dan kinerja auditor eksternal.
Mengulas hakikat dan cakupan atas jasa selain audit yang diberikan oleh auditor eksternal, jika ada, dengan memperhatikan independensi dan objektivitas serta kewajaran atas nilai keekonomian dari jasa yang diberikan.
- Memberikan saran atas nominasi kandidat auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan akhir pengangkatan oleh Pemegang Saham, sebagaimana telah diwajibkan dalam peraturan pemerintah.

- Melakukan tinjauan bersama dengan manajemen dan auditor eksternal atas hasil dari audit laporan keuangan dan semua hal yang perlu dikomunikasikan, termasuk jika terdapat ketidaksetujuan, kepada Dewan Komisaris sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- Memberikan pendapat independen jika terjadi ketidaksetujuan antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa-jasa yang diberikan.
- Memberikan tinjauan jika terjadi keluhan atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Mengulas efektivitas sistem pemantauan atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh manajemen, pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator, hasil observasi auditor internal/eksternal, berikut tindak lanjut yang diperlukan.
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari segala kegiatan dan layanan yang dilakukan oleh Komite.

(b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disiapkan oleh Direksi, termasuk:

- menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan,
- melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan manajemen risiko,
- mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko yang secara berkala disesuaikan dengan pengembangan ketentuan perundang-undangan,
- mengidentifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan
- melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris jika penugasan tersebut telah ditentukan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

(iii) Frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Audit

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (4 kali rapat)
-----	---------------------	-----------------------------

		Jumlah Kehadiran	%
1.	Sahata Lumban Tobing*	1	25%
2.	Diwe Novara**	3	75%
3.	Philippe Vezio	4	100%
4.	Agustino T. M. Sidabutar	4	100%
5.	Linda Juliana JL Delhaye ***	2	50%
6.	Lim Kurniawan Setiadarma	4	100%

Keterangan:

- *) menjabat hingga pertemuan ke 1
- ***) mulai menjabat dari pertemuan ke 2
- ***) mulai menjabat dari pertemuan ke 3

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat (4 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Agustino T. M. Sidabutar	4	100%
2.	Nasuka	4	100%
3.	Yuke Irawati	4	100%
4.	Indah Dwi Yuniati	4	100%

- (iv) Program kerja komite dan realisasinya
- (a) Program kerja Komite Audit
- Melakukan rapat setiap tiga bulan sekali. Untuk tahun 2021 realisasinya rapat 4 kali (100%)

(b) **Program kerja Komite Pemantau Risiko**

Pelaksanaan program kerja Komite dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan perincian sebagai berikut:

- Meninjau Daftar Risiko dan rencana mitigasi. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah meninjau dan memperbarui Daftar Risiko dan rencana mitigasi dengan departemen terkait.
- Latihan Pengkajian Diri Koordinasi Kontrol di setiap departemen. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah mengkoordinasikan Control Self-Assessment dengan departemen terkait.
- Melakukan Program Budaya Risiko. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah memberikan pelatihan dan sosialisasi risiko kepada seluruh unit di perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kepada seluruh karyawan.
- Menyiapkan dan menyerahkan Laporan Peraturan. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah menyerahkan 12 laporan regulasi di bawah Departemen Manajemen Risiko kepada regulator tepat waktu.
- Meninjau Business Continuity Management (BCM) perusahaan. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah merevisi dokumen BCM dan mengaktifkan COVID-19 BCP sejak Maret 2020 karena pandemi Covid-19. Tes BCP tahunan pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Oktober 2021. Pada periode ini, Tes IT DR juga dilaksanakan bersamaan dengan Tes BCP.
- Memberikan skenario pengujian stres. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah menyediakan skenario stress test untuk tahun 2021 dan perusahaan telah memasukkan hasil analisis Stress Testing dalam laporan Aktuaris untuk periode tahun 2021.
- Review dan update Kebijakan Manajemen Risiko dan Risk Appetite. Realisasi: Departemen Manajemen Risiko telah memperbarui Kebijakan Manajemen Risiko dan Risk Appetite.

3) **Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal**

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

a) **Fungsi kepatuhan**

- (1) Adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia telah membentuk Komite Kepatuhan (*Compliance Committee*) pada tanggal 23 Mei 2007. Komite Kepatuhan adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Ketua Komite Kepatuhan adalah Direktur Kepatuhan. Struktur dan tugas dari komite Kepatuhan meliputi:

- (a) Ketua adalah Direktur Kepatuhan yang dalam tugasnya dibantu oleh Direktur Muda sebagai Wakil Ketua.
- (b) Ketua bertugas mengangkat dan memberhentikan Komite, menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kepatuhan dengan memperhatikan usulan dari Komite.
- (c) Anggota Komite Kepatuhan lainnya terdiri atas Koordinator (*Compliance Officer*) Anggota lain terdiri atas anggota Direksi lainnya, seorang Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*), dan Anggota-anggota yang diangkat dari bagian-bagian terkait seperti Kepala Divisi Komersial, Kepala Divisi Klaim, Kepala Bagian Manajemen Risiko, dan Kepala Bagian Internal Audit. Selain itu fungsi kepatuhan juga didukung oleh Compliance Team yang Anggota-anggotanya adalah perwakilan dari tiap-tiap departemen. Anggota Team bertugas untuk memantau setiap informasi tentang hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- (2) Kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum

Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total as of December 31 st	100 Billion	100 Billion	100 Billion	100 Billion	100 Billion	100 Billion	100 Billion

- (3) Tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

- (i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan

Solvency level as of December 31 st	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Company's Solvency Level	581.777	619.972	583.133	598.003	709.614	948.235	1,122,365

- (ii) Rasio Likuiditas untuk Perusahaan

Liquidity Ratio as of December 31 st	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Company's Liquidity Ratio	135%	140%	146%	110%	184%	176%	171%

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan

Investment Adequacy Ratio as of December 31 st	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Company's Investment Adequacy Ratio	276%	245%	254%	157%	163%	196%	189%

- (1) Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perusahaan telah menunjuk Pejabat APU dan PPT, yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Perusahaan sudah menunjuk Pejabat APU and PPT, yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 23/POJK.01/2019 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sepanjang 2021 tidak terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang dihadapi oleh Perusahaan.

No.	Aktivitas	Jumlah Laporan
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (<i>CTR</i>) kepada PPATK	Nihil
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>STR</i>) kepada PPATK	Nihil
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait <i>CTR</i> dan <i>STR</i> dari: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	13
4.	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	6

- (2) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen maka Perusahaan telah membentuk Komite Penanganan Keluhan Pelanggan. Komite Penanganan Keluhan Pelanggan jawab kepada Direksi.

Tugas-tugas komite ini adalah:

- a. Mengevaluasi keluhan yang diterima dari pelanggan.
- b. Melaporkan hasil evaluasi pada butir a. ke Direksi secara periodik.
- c. Mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka untuk memberikan peningkatan kepuasan pada pelanggan secara maksimal dan mengurangi timbulnya keluhan pelanggan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi, yang berhubungan dengan peningkatan kepuasan pelanggan.

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Consumer Complaint Service Unit (CCSU)	Edward

b) Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

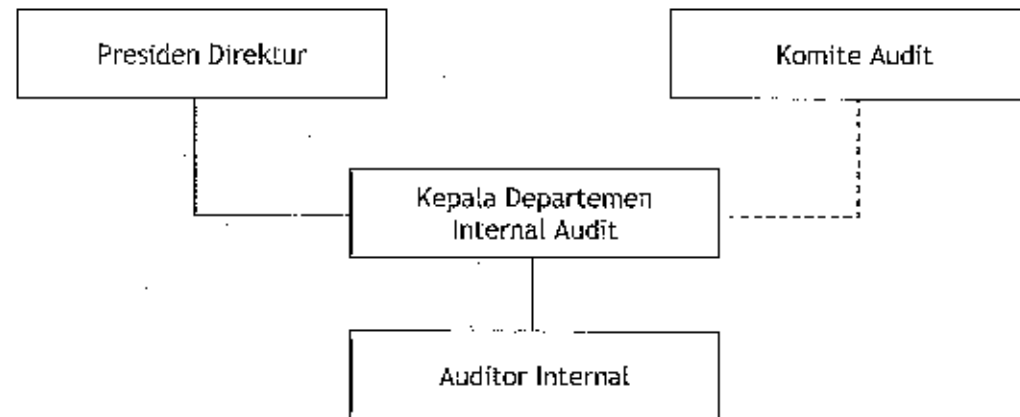
(1) Ruang lingkup pekerjaan audit.

Ruang lingkup pekerjaan Audit internal meliputi semua proses bisnis di dalam perusahaan.

(2) Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal.

Departemen Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Departemen Internal Audit. Seluruh internal auditor di dalam satuan kerja audit internal secara langsung bertanggungjawab kepada Kepala Departemen Internal Audit.

Satuan kerja audit internal secara fungsional berada di bawah Direktur Utama dan secara administratif berada di bawah Komite Audit.



(3) Independensi auditor internal.

Departemen Audit Internal merupakan fungsi yang independen dan bebas dari pengaruh apapun dalam menjalankan fungsi audit internal.

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur mengenai pengangkatan, penilaian performa, remunerasi dan pemberhentian atau pemindahan dari Kepala Departemen Audit Internal. Pengangkatan, pergantian dan pemindahan dari Kepala Departemen Audit Internal harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk mempertebal independensinya, Departemen Audit Internal tidak boleh:

- a. Memiliki kewenangan ataupun memiliki tanggungjawab langsung atas setiap kegiatan operasional yang diperiksa, atau bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Departemen Audit Internal hanya berupa saran dan tidak untuk membebaskan bagian yang terkait dari kewajibannya dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan kegiatan mereka secara tepat.
- b. Tertlibat di dalam proses pengendalian internal yang dilakukan secara rutin harian di perusahaan.

- c. Mengembangkan, mengukuhkan atau menjabarkan prosedur, menyiapkan catatan-catatan atau terlibat pada fungsi operasional apapun, yang biasanya dapat menjadi obyek yang diaudit.

Pada kondisi dimana Kepala Departemen Audit Internal menerima tanggung jawab operasional unit yang akan diaudit, maka audit internal harus dilaksanakan oleh pihak di luar Departemen Audit Internal.

Auditor internal di dalam Departemen Audit Internal harus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan objektif sehingga dapat melaksanakan audit secara adil dan tidak berpihak.

(4) Uraian tugas satuan kerja.

Audit internal bertanggungjawab untuk mengulas dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan pengelolaan proses pengendalian yang ada di dalam perusahaan.

Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengulas dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan dari sistem pengendalian intern dalam melindungi aset perusahaan,
- Mengevaluasi keandalan dan integritas dari manajemen dan informasi keuangan,
- Memastikan kepatuhan pada kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang telah ditentukan,
- Memberikan saran untuk sistem pengendalian intern yang tepat dalam kapasitasnya sebagai konsultan; dan
- Melaksanakan investigasi secara *ad hoc* atau memberikan ulasan-ulasan sebagaimana diminta oleh Komite Audit dan/atau Manajemen.

Bekerja sama dengan Komite Audit.

Kepala departemen Audit internal harus bekerja sama dengan Departemen Internal Audit TMA Asia.

Bertanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan yang relevan dengan keterlibatan dan tugas Auditor Internal, kecuali diwajibkan oleh undang-undang dan proses hukum/persidangan pengadilan.

(5) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal.

Per 31 Desember 2021, jumlah staff yang disetujui adalah 6 (enam) orang. Satuan kerja audit internal memiliki 1 (satu) orang kepala departemen dan 1 (satu) orang kepala seksi yang membawahi 4 (empat) orang staf audit internal.

(6) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

1. Audit Treaty Reinsurance; dilaporkan pada 28 Januari 2022
2. Audit Investasi; dilaporkan pada 7 Juni 2021
3. Audit Kantor Perwakilan Cikarang; dilaporkan pada 28 Januari 2022
4. Audit Prosedur Financial Closing; dilaporkan pada 28 Januari 2022
5. Audit Departemen Underwriting Personal Lines; dilaporkan pada 23 November 2021
6. Audit Departemen Local Commercial; dilaporkan pada 28 Januari 2022
7. Audit Fixed Management Asset; akan dilaporkan pada April 2022
8. Audit cabang Medan; dilaporkan pada 25 Maret 2022
9. Audit cabang Bandung; dilaporkan pada 28 Januari 2022
10. Audit IT Performance Management; dibatalkan

c) Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Untuk tujuan audit eksternal, Perusahaan telah menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Akuntansi Keuangan Indonesia. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi dalam catatan akuntansi dengan benar dan membangun serta memelihara pengendalian internal karena mereka diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan atau kesalahan.

Perusahaan juga menyediakan akses ke auditor eksternal untuk semua informasi yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan asli akuntansi, dokumentasi dan hal-hal lainnya, informasi tambahan, dan akses tak terbatas terhadap personel yang ditentukan oleh auditor eksternal dimana diperlukan untuk memperoleh bukti untuk tujuan audit.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Audit Indonesia, manajemen Perusahaan telah memberikan representasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hasil pengujian

audit, tanggapan terhadap pertanyaan auditor eksternal dan representasi tertulis dari manajemen PT Asuransi Tokio Marine Indonesia menyediakan bukti materi untuk auditor eksternal dalam membentuk opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 7 tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Lucy Luciana Suhenda, S.E.,Ak.,CPA
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2018	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC)	Andry Danil Atmadja, S.E., Ak.,CPA
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC)	Jusuf Wibisana

4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) dilakukan setiap bulan. Hasil dari rapat Komite Pemantau Risiko akan di laporkan ke semua anggota peserta rapat. Semua saran yang didapat pada saat rapat, akan ditindak lanjuti oleh tim Manajemen Risiko dan hasilnya akan dilaporkan pada saat rapat Komite Pemantau Risiko berikutnya. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Direktur Keuangan dan Kepala Divisi Keuangan.

- b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
Penetapan limit risiko dialur dalam dokumen *Risk Appetite Statement*. Dalam dokumen *Risk Appetite Statement* terdapat risiko perusahaan secara keseluruhan, yang kemudian dipersempit menjadi risiko underwriting dan risiko investasi perusahaan. Di dalam dokumen ini juga mengatur tentang 41erjasa risiko, toleransi risiko, dan batas risiko perusahaan.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
Melalui identifikasi risiko (*Risk Identification*), pencatatan risiko (*Risk Register*), pemantauan dan pengendalian risiko (*Risk Monitoring*). Proses pengendalian risiko dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan proses indentifikasi risiko-risiko yang baru sampai dengan pencatatan risiko-risiko baru akan dilakukan setahun sekali. Semua risiko yang tercatat dan dilaporkan pada saat rapat Komite Pemantau Risiko.
- d) Sistem informasi manajemen risiko
Sistem informasi manajemen risiko diatur dalam dokumen Kebijakan IT (*IT Policy*). Dimana di dalam dokumen ini mengatur hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengurangi risiko 41erjas informasi perusahaan.
- e) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Sistem pengendalian intern secara menyeluruh terdapat dalam *Control Self Assessment (CSA)* yang kita lakukan secara berkala (1 tahun sekali) dengan pemantauan 3 bulan sekali. Dalam CSA perusahaan diharapkan memberikan 41erjasa-kontrol yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi atau menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan.

5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Remunerasi yang diterima oleh Direksi yaitu berupa gaji dan bonus yang besarnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris yaitu berupa gaji dan bonus yang besarnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Selain gaji dan bonus Direksi menerima fasilitas lain yaitu sebagai berikut:

HAL	DIREKTUR ORANG JEPANG	DIREKTUR ORANG INDONESIA
Mobil	3.000 CC	3.000 CC
Mobil Kedua - Gaji Pengemudi - Bensin - Parkir, Tol - Perawatan - Pajak, Pendaftaran	Disediakan untuk digunakan oleh keluarga - ditanggung oleh Perusahaan - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu - ditanggung oleh individu	Tidak ada mobil kedua yang disediakan
Perumahan	Penyediaan Kompleks dan/atau Apartemen dengan keamanan yang baik dengan kualitas yang tinggi dan wajar serta uang sewa yang wajar.	<u>Ditentukan oleh Asuransi Jasa Indonesia</u> Perusahaan membayar 10% gaji bulanan sebagai tunjangan perumahan kepada Direktur Indonesia

Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas lain selain gaji dan bonus.

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

(1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.

Remunerasi untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- (2) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)	4	15.460,39	4	1.459,30
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).	-	-	-	-
Total	4	4	15.460,39	4

1.459,30

- (3) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	3	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	-	3

Keterangan:

*) yang diminta secara tunai

6) Rencana strategis Perusahaan

- a) Rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Perusahaan adalah menjadikan Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) sebagai salah satu dari 10 besar asuransi umum di Indonesia dalam pertumbuhan premi, laba, layanan dan efisiensi kerja. Pertumbuhan premi penutupan langsung dan tidak langsung TMI untuk 5 tahun ke depan adalah rata-rata sebesar 8,0% per-tahun.

- (1) Pertumbuhan premi difokuskan pada portfolio ritel lokal untuk dapat memberikan hasil pertumbuhan yang stabil, berkesinambungan.
- (2) Membangun sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada tertanggung dan efisiensi kerja.
- (3) Membangun SDM yang berkualitas untuk mampu memenangkan persaingan di pasar.
- (4) Peningkatan pengawasan perusahaan secara terpadu dalam manajemen resiko perusahaan juga sistem audit internal untuk mendukung Good Corporate Governance (GCG).

- b) Rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Untuk tahun 2022, TMI menargetkan premi langsung dan tidak langsung sebesar Rp 1.967.8 miliar atau tumbuh 8.8% dibandingkan tahun 2021. Perseroan berharap penjualan mobil di tahun 2022 akan terus membaik mengikuti pemulihan pertumbuhan ekonomi, walaupun kami masih belum bisa berasumsi akan ada pemulihan yang full power karena penanganan COVID-19 yang lamban masih menjadi faktor penting yang akan menopang tren naik konsumsi dan investasi domestik. Pengadaan booster vaksin Covid-19 diproyeksikan rampung dalam 6 bulan pertama 2022 dan didistribusikan hingga akhir 2022. Meski demikian, kami tetap optimistis bisnis e-commerce akan tetap berjalan dan terus berkembang di tahun 2022.

Perekonomian Indonesia diprediksi baru pulih sepenuhnya mulai tahun 2022, artinya berada pada kondisi yang sama sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Pemerintah telah menyiapkan strategi berupa rencana jangka menengah untuk menghadapi ketidakpastian pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah memperkirakan ekonomi akan pulih sekitar 6,0% pada tahun 2022 dan 5,5% menjadi 6,3% pada tahun 2023. Senada dengan prediksi itu, Gaikindo (Asosiasi Otomotif Indonesia) memprediksikan pertumbuhan penjualan mobil dalam negeri akan mulai kembali jadi normal pada 2022. Dengan asumsi tersebut, maka kami berasumsi bahwa Bisnis Motor kita akan meningkat secara signifikan mulai tahun 2022 dan seterusnya. Sama seperti tahun 2021, kami juga memperkirakan

prospek E-commerce (transaksi online) masih menjanjikan di tahun 2022 dan 2023 apalagi masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi normal yang baru. Dengan demikian, TMI berencana untuk mencapai premi langsung dan tidak langsung sebesar Rp 2.112,4 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh 21,5% dibandingkan tahun 2021 dan Rp2.368,8 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh 12,1% dibandingkan tahun 2022.

Inisiatif TMI untuk tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Inisiatif	Target
1	<p>Perluas Bisnis Komersial Jepang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dapatkan informasi yang diperlukan & raih klien baru dan/atau yang sudah ada yang berlokasi di kawasan industrib. Lakukan aktivitas cross-selling dan tawarkan proposal dengan cakupan yang lebih luas kepada klien yang ada (misalnya dengan menganalisis daftar klien dengan GWP > IDR. 1.0 miliar)c. Dapatkan proyek baru dari investor baru dengan mendekati kontraktor Jepang.d. Kembangkan produk lini keuangan, mis. TCI, D&O, Cyber, dll.e. Jelajahi proyek tempat kerja/proyek ritel & proyek perusahaan/cakupan manfaat karyawanf. Mempercepat <i>Big Challenge Project</i> dan mengembangkan bisnis Kargo Laut dengan melakukan penetrasi lebih jauh ke perusahaan penerusan/perdagangan /pergudangan	2022 Target: IDR 867.5 milyar
2	<p>Perluas Bisnis Komersial Lokal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bisnis Broker<ul style="list-style-type: none">• Targetkan lini bisnis terLentu seperti Financial Lines, Property, Marine Cargo• Memperluas 15 Broker Teratas (memanfaatkan peringkat <i>AM Best</i> untuk mendapatkan akun prospektif)	2022 Target: IDR 202.8 milyar

	<ul style="list-style-type: none">• Memanfaatkan keahlian dari Kantor Regional• Bekerja sama dengan beberapa departemen untuk menemukan segmen yang menguntungkan dalam mengembangkan bisnis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam bisnis lokal <p>b. Bisnis Reasuransi</p> <ul style="list-style-type: none">• Menargetkan beberapa perusahaan asuransi (ceding companies) di bawah grup konglomerasi• Mengembangkan pengaturan timbal balik dengan beberapa Pialang JV dan Pialang Lokal Besar <p>c. Direct Business</p> <ul style="list-style-type: none">• Fokus pada bisnis ukuran menengah• Mempromosikan penjualan silang ke klien yang sudah ada• Berkolaborasi dengan klien yang ada untuk mengembangkan bisnis	
3a	<p>Perluas Bisnis Motor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Berkolaborasi dengan DSF dalam berbagai proyek a.g. integrasi sistem, program Dashcam, mobil.id, mobil bekas bersertifikat, dll.b. Memaksimalkan penetrasi ke dalam perusahaan leasing yang sudah ada, mis. acara pemasaran, perluasan jaringan, kencangkan hubungan dengan manajemen dealer, dll.c. Mempercepat proyek MMKSI (garansi mesin)	2022 Target: IDR 171.3 milyar
3b	<p>Memperluas Bisnis Cabang (bisnis motor adalah portofolio utama di cabang):</p>	2022 Target: IDR542.3 milyar

	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan pangsa di perusahaan Leasing (dengan menjalin kerjasama yang erat dengan Departemen Bisnis Motor) dan meningkatkan layanan penanganan klaim (bersama-sama dengan Departemen Klaim)b. Jelajahi pasar dengan melakukan diversifikasi ke saluran distribusi lain (Pialang, Agen, Langsung) dan portofolio non-Mobil (Properti, Kargo Laut, PA & Perjalanan)c. Perluas jaringan (konsep Kantor Biaya Rendah)d. Control Loss Ratio (pemilihan risiko dan analisis portofolio) dan E/R (efisiensi operasional)e. Memperkuat fungsi koordinasi antara Kantor Pusat dengan seluruh Kantor Cabang/Perwakilan di bawah BOS (Branch & Agency Operating Support Department)	
4	<p>Perluas Bisnis Affinity (Digital Strategy):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Luncurkan kemitraan baru (kemitraan B2B2C) dan tawarkan solusi digital yang lebih luas kepada mitra afinitas saat inib. Perluas langsung ekspansi B2B Marine (proyek perusahaan logistik)c. Kembangkan proyek Yakujoriko, mis. iKanvas, dll.d. Jelajahi proyek Agregator (di bawah Kewajiban atau sebagai alternatif di bawah PA atau Mobil)e. Carilah peluang di Travel, PA dan produk alternatif lainnya dengan Fasilitas Broker atau Agen Perjalananf. Tinjau atau hapus mitra yang tidak berkinerja	2022 Target: IDR 214.3 milyar
5	<p>Perluas Bisnis Agen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekrut dan dorong agen baru untuk melakukan transfer portofolio ke TMI dan berproduksi lebih banyak melalui Agency Campaign and Benefit Program yang kompetitif	2022 Target: IDR 96.7 milyar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">b. Menjaga dan mengembangkan agen dengan memanfaatkan PIC berpengalaman (dengan latar belakang yang kuat dalam menangani agen dan jaringan keagenan)c. Gunakan Agen TMLI untuk menjual produk TMI melalui Program Kolaborasi TMI & TMLId. Tingkatkan produktivitas agen dengan meluncurkan beberapa paket produk sederhana melalui Aplikasi Keagenane. Bekerja sama secara erat dengan Komite Rasio Kerugian (Underwriting, Aktuaris, dan Klaim) untuk memantau kinerja agen | |
|---|--|

7) **Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya**

Perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan kondisi keuangan Perusahaan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal tersedia untuk diunduh di situs web Perusahaan (<http://www.tokiomarine.com/id/id/about-us/general-insurance/financial-information.html>). Perusahaan menyediakan informasi mengenai produk-produk Asuransi yang ada yang disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* serta dipublikasikan dalam situs web Perusahaan. Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Perusahaan.

8) **Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain**

No.	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	Alasan pemilihan pihak lain
1.	<i>Cleaning Service</i>	ISS	No. 574/T/P.U/2000	1 Tahun	Profesionalitas, penyedia jasa cleaning service terbaik di Jakarta
2.	Driver and Messenger	PT Kokarja Impen Agung	No. 8120219091497	1 Tahun	Telah lama menjalin kerjasama, Anggotanya merupakan mantan pekerja Koperasi yang dibentuk Perusahaan
3.	Security - Makassar	PT Mata Elang Prima	No.588/24.1PM.7/31.75/-1.824.27/e/2017	1 Tahun	Profesionalitas, penyedia layanan jasa security terbaik di Makassar
4.	<i>Call Center</i>	PT Infomedia	No. 00412-04/PB/P3/1.824.271		Profesionalitas, penyedia layanan call center terbaik di Jakarta

9) **Pelaksanaan wewenang RUPS**

- a) Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS. RUPS diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya pada bulan Juni. Agenda dalam RUPS tahunan adalah sebagai berikut:

- Direksi menyampaikan laporan tahunan untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dan perhitungan dividen.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Di bawah ini adalah keputusan yang dihasilkan pada RUPS tahun 2021:

No.	Tanggal	Keputusan
1.	28 April 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Keuangan untuk tahun 2020, Laporan Manajemen tahun 2020, dan Rencana Bisnis untuk tahun 20212. Penunjukan Auditor Eksternal untuk Laporan Keuangan tahun 20213. Pembagian dividen tahun 20214. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021

b) Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS.

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat.

Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

- c) Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.
Tidak ada hal-hal yang masih menunggu persetujuan RUPS.

10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut.
- b) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e) Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Komisaris Independen harus memenuhi kriteria berikut:

- a) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan dalam hal:
 - (1) Tidak ada hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,
 - (2) Tidak memiliki posisi ganda sebagai direktur atau komisaris di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
 - (3) Bukan rekan (*partner*) atau badan konsultasi Dewan Direksi yang memberi pelayanan profesional kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali.
 - (4) Bebas dari segala kepentingan dan aktivitas usaha atau hubungan lainnya dengan pemegang saham pengendali dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, yang dapat diartikan sebagai menghambat atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir secara independen untuk kepentingan Perusahaan.
- b) Tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam hal:

- (1) Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Tidak ada hubungan dengan anggota piutang pinjaman Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

c) Tidak ada hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam hal:

- (1) Tidak memiliki jabatan ganda sebagai direktur atau komisaris di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perusahaan atau larangan lain terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukan rekan (partner) atau badan konsultasi Dewan Direksi yang memberi pelayanan profesional kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
- (3) Bebas dari segala kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain dengan Perusahaan yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak atau berpikir secara independen untuk kepentingan Perusahaan.
- (4) Ketentuan lain yang ditetapkan di peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

Jumlah Klien aktif per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 78.593 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Klien Perusahaan	Jumlah Klien Perorangan	Total Klien
11.665	66.928	78.593

Jumlah Polis yang diterbitkan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Lini Bisnis	Jumlah Polis Baru	Jumlah Polis Perpanjangan	Total Polis
1	AUTOMOBILE	38.255	6.799	45.008
2	CREDIT	22	44	66

3	ENGINEERING	602	342	933
4	FIRE	4.713	8.494	13.038
5	HEALTH	120		120
6	LIABILITY	194	501	687
7	MARINE CARGO	122.369	23	122.392
8	MARINE HULL	14	16	30
9	MISCELLANEOUS	534	1.175	1.707
10	PERSONAL ACCIDENT	10.990	339	11.313
11	TRAVEL	1.388	6	1.394
	Grand Total	179.201	17.718	196.688

Jumlah Klaim selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Line of Business	Jumlah Outstanding Claims per 31 December 2020	Jumlah klaim Baru 2021	JUmlah Penyelesaian Klaim 2021		Jumlah Outstanding Claims per 31 December 2021
			Klaim Dibayar	Klaim Tanpa Pembayaran*)	
Kendaraan Bermotor	2,021	26,132	27,780	873	2,478
Engineering	269	190	262	46	238
Property	1,199	4,054	2,913	673	2,239
Marine Cargo	25,047	471,608	420,572	22,047	62,720
Varia	80	107	150	18	63
Liability	69	40	39	14	66
Kecelakaan Diri	39	326	255	96	36
Marine Hull	6	7	12	2	6

Kredit	15	35	84	1	29
Perjalanan	5	27	19	11	1
Total	28,750	502,661	452,193	23,809	67,925

*) Klaim Tanpa Pembayaran: Kasus klaim yang selesai karena ditolak atau dibatalkan oleh tertanggung atau tidak ditindaklanjuti oleh tertanggung.

Kasus litigasi yang sedang ditangani oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia per 31 Desember 2021 (baik kasus baru maupun kasus lama) adalah sebagai berikut:

a. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sebagai Tergugat:

No.	Kasus	Tertanggung (Penggugat)	Nilai Gugatan	Status	Keterangan
1	Gugatan dari tertanggung untuk kasus kapal tenggelam	PT Wawasan Kebun Nusantara	USD 844,800	Menunggu putusan MA (Open). TMI adalah salah satu tergugat.	TMI kalah di PN Medan dan PT Sumut tapi hanya diwajibkan membayar IDR. 567,750 (biaya perkara).
2	Gugatan dari tertanggung untuk kasus lantai amblas (kerusakan bangunan)	PT Harirezeki Kita Semua	IDR 1.114.342.680,48	Menunggu putusan MA (Open)	TMI menang di PN Medan, tapi kemudian kalah di PT Sumatera Utara
3	Gugatan dari tertanggung atas klaim kebakaran yang ditolak karena	PT Multi Spunindo Jaya	IDR 990,089,754 plus USD 533,965.90	Panel sedang berdiskusi untuk mengajukan Judicial Review.	TMI kalah di PN Jakarta Pusat dan PT Jakarta. TMI are anggota ko-asuransi dengan share 10%

	pembayaran premi terlambat.			BOD TMI memutuskan untuk tidak mengajukan Judicial Review, namun tetap bersedia untuk bernegosiasi tentang jumlah settlement. (Open)	
4	Gugatan dari PT JTrust Investment Indonesia karena nasabah tidak membayar cicilan untuk pembiayaan konsumen. Penggugat melakukan gugatan yang salah karena meskipun Tergugat adalah karyawan TMI, tetapi sebenarnya mantan karyawan di TMI letapi sudah mengundurkan diri.	PT JTrust Investment Indonesia	IDR 793,193,994,-	Pada PT Jakarta Pusat, Penggugat membatalkan gugatannya karena mereka menggugat pihak yang salah. (Selesai)	

Keterangan : PN – Pengadilan Negeri, PT = Pengadilan Tinggi, MA = Mahkamah Agung

b. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sebagai Penggugat:

No	Kasus	Tertanggung	Jlh Klaim (Dibayar)	Tergugat	Jlh Gugatan	Status	Remarks
1	Gugatan berdasarkan hak subrogasi atas kasus kapal terbakar.	Godwin Austen International, LTD/ Layar Sentosa	USD 626,175	1. PT Bumi Laut Shipping Service 2. PT Layar Sentosa	USD 569,250.00	Menunggu eksekusi unit kapal lain (sister ship), berdasarkan putusan PN Jkt Pusat (Open)	TMI sudah menang di Arbitrase di Singapore. Sekarang kami berhasil menangkap kapal lain (sister ship) dari Terdakwa.
2	Gugatan pembayaran ganti rugi berdasarkan hak subrogasi atas kasus penggelapan	PT Isuzu Astra Motor Indonesia	IDR 254,774,928	CV Sujatrans Express	IDR 254,774,928	Menunggu putusan MA (Open)	TMI kalah di PN dan PT
3	Gugatan pembayaran ganti rugi berdasarkan prinsip subrogasi dalam kasus muatan basah akibat kebocoran kapal	PT. Multi Mas Chemindo	Rp. 2.191.189.000,-	PT. Arkanjaya Lestari Abadi, PT. Aryanta Sejati Abadi, PT. Berkah Air Samudra, PT. Artha Bahari Nusantara	Rp. 2.191.189.000,-	Menunggu Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya (Open)	

Keterangan : PN = Pengadilan Negeri, PT = Pengadilan Tinggi, MA = Mahkamah Agung

11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi

No.	Name of Agent	No. of Agent	Certificate Ownership	Agency Cooperation Agreement	Branch	Remark
1	ADS Associates	1	AAUI	MKT.AG.PKK.14.04.117	Jakarta	
2	PT Japanindo Insurance Service	1	AAUI/MOF	MKT.AG.PKK.06.03.001	Jakarta	
3	CV Sentral Proteksi Servindo	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.006	Jakarta	
4	CV E-Marine	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.027	Jakarta	
5	CV Paramitra Insurance Consultant	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.015	Jakarta	
6	PT Arthasindo Mitra Utama	1	AAUI	MKT.AG.PKK.19.10.138	Jakarta	
7	PT Tiga Mutiara Sekawan Andria	1	AAUI	MKT.AG.PKK.12.10.025	Jakarta	
8	CV Mitra Total Proteksindo	1	AAUI	MKT.AG.PKK.20.02.151	Jakarta	
9	CV Tri Arma Sejahtera	1	AAUI	MKT.AG.PKK.18.07.074	Jakarta	
10	PT Bina Cipta Solusindo	2	AAUI	MKT.AG.PKK.19.06.117	Jakarta	
11	CV Mandiri Sukses Gemilang	1	AAUI	MKT.AG.PKK.20.12.286	Medan	
12	CV All Insurance Indonesia	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.06.171	Surabaya	
13	CV Surya Insurance Office	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.11.278	Surabaya	
14	CV Trans Indo Utama	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.06.175	Surabaya	
15	PT. Raih Impian Capai Harapan	1	AAUI	MKT.AG.PKK.21.02.189	Denpasar	

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Tokio Marine Indonesia tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perusahaan, perusahaan asuransi lain, lembaga jasa keuangan selain perusahaan perasuransian dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Keterangan: Indonesia /Luar Negeri
		A		B		C		D		
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Sancoyo Setuabudi	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makoto Terada	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nastiti Evia Lutfi	Direktur									
Hajime Jodai	Direktur									
Diwe Novara	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Philippe Vezio	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustino T. M. Sidabutar	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linda Juliana JL Delhaye	Komisaris Inepended	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan
- B. Perusahaan perasuransian lain
- C. Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Berikut adalah tabel hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan								
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *
1. Sancoyo Setiabudi	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2. Hajime Jodai	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3. Nastiti Evia Lutfi	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4. Makoto Terada	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Berikut adalah tabel hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **
1. Sancoyo Setiabudi	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2. Hjime Jodai	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3. Makoto Terada	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4. Nastiti Evia Lutfi	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung, ipar, dsb

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

Berikut adalah tabel hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan								
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *	Ya	Tidak	Keterangan *
1. Diwe Novara	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2. Philippe Vezio	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3. Agustino T. M. Sidabutar	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4. Linda Juliana JL Delhaye	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Berikut adalah tabel hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **	Ya	Tidak	Keterangan **
1. Diwe Novara	-	√	-	-	√	-	-	√	-
2. Philippe Vezio	-	√	-	-	√	-	-	√	-
3. Agustino T. M. Sidabutar	-	√	-	-	√	-	-	√	-
4. Linda Juliana JL Delhaye	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung, ipar, dsb

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (meliputi honorer dan tenaga alih daya) yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

No.	Jenis Rasio	Besarnya Rasio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	0.04
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	0.23
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	0.60
4.	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	0.30

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

F. Penerapan Tata Kelola Investasi

1) Kebijakan dan strategi investasi

Menimbang bahwa fungsi investasi dalam mendukung tujuan Perusahaan menjadi lebih strategis seiring dengan semakin besarnya kekayaan investasi Perusahaan. Maka Perusahaan berkomitmen untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya menyangkut tata kelola investasi.

Perusahaan harus mengelola aset sesuai dengan strategi alokasi aset untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam batas risiko yang telah disesuaikan dengan kondisi modal perusahaan.

2) Pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi

- a) Dalam mengelola investasi perusahaan mempertimbangkan risiko pasar, risiko bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.
- b) Perusahaan memperhatikan kelebihan akumulasi kredit untuk debitur tertentu (banks, penerbit surat utang, dan lain-lain).
- c) Perusahaan mempertimbangkan diversifikasi portfolio, kecukupan likuiditas dan kecukupan modal berbasis risiko yang ditentukan oleh regulasi.
- d) Dalam melaksanakan strategi alokasi aset, Perusahaan memperhatikan kerangka manajemen aset dan hutang.

3) Pengalihdayaan investasi kepada pihak lain

Perusahaan mengalihkan beberapa investasi kepada beberapa manajer investasi.

G. Jumlah Penyimpangan Internal

Yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah tindakan penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perusahaan.

1) Pengungkapan mengenai penyimpangan internal

Selama tahun 2021 terdapat 2 (dua) penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perusahaan.

Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Penyimpangan	0	0	3	2	0	0
Status dari Kasus-kasus di atas adalah:						
Total diselesaikan	0	0	3	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

H. Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya

1) Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal sepanjang tahun 2021.

2) Transaksi material dengan pihak terkait

a) Selama tahun 2021 tidak terdapat pembelian, penjualan, pertukaran saham atau asset dengan nilai 10% atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dengan pihak terkait dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi.

b) Selama tahun 2021 Perusahaan tidak melakukan perjanjian manajemen dan layanan dengan pihak terkait, namun berbagi sumber daya (*sharing of resources*) dengan pihak terkait (PT Tokio Marine Life Indonesia) yaitu dalam hal pemakaian gedung kantor Cabang Makassar.

c) Perjanjian Reasuransi *Treaty* (otomatis) yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Non Marine 1st Surplus
- (2) Non Marine 2nd Surplus
- (3) Whole Account Risk and Catastrophe Excess of Loss
- (4) Trade Credit Insurance Quota Share
- (5) Financial Line & Cyber Insurance Surplus

Penyelesaian saldo antar perusahaan (*settlement of inter-company balances*) dilakukan sesuai dengan perjanjian yaitu sebagai berikut:

- (1) Untuk 1st Surplus dan 2nd Surplus penyelesaian saldo antar perusahaan dilakukan per 3 bulan (tiap kuartal).
- (2) Untuk Whole Account Risk and Catastrophe Excess of Loss penyelesaian saldo antar perusahaan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, April, Juli and October.
- (3) Untuk Trade Credit Insurance Quota Share penyelesaian saldo antar perusahaan dilakukan per 3 bulan (tiap kuartal).
- (4) Untuk Financial Line & Cyber Insurance Surplus penyelesaian saldo antar perusahaan dilakukan per 3 bulan (tiap kuartal).

3) Klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan.

Sesuai Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor No. 31/SEOJK.05/2015 batas maksimum retensi sendiri adalah 10% dari modal sendiri.

Modal sendiri (equity) perusahaan berdasarkan laporan *Risk Based Capital* (RBC) tahun 2021 adalah IDR 1,318,512,614,925, sehingga 10% dari modal sendiri Perusahaan adalah IDR IDR 131,851,261,492.

Selama 2021 tidak ada klaim asuransi yang diajukan terhadap Perusahaan yang net retensi nilainya 10% atau lebih besar dari modal sendiri Perusahaan.

No.	Lini Usaha	Objek Pertanggung	Nilai Klaim (IDR)	Retensi Sendiri (IDR)	Keterangan
1.	Tidak ada	-	-	-	-

4) Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang timbul di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, perusahaan telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern yang tertulis dalam Manual Kepatuhan mengenai penanganan, administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Tidak ada	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

5) Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Tidak ada informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu antara lain: intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

I. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan selama periode tahun pelaporan dan proses hukumnya telah berjalan.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	2	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata	5	-
Total	7	-

III. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

Rencana tindak disusun untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia pada Lampiran. Rencana tindak meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala atau hambatan penyelesaiannya.

Berikut adalah rencana tindak (*Action Plan*) yang akan dilakukan oleh Perusahaan.

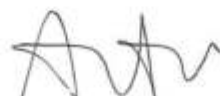
No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Nil	-	-	

2021 Good Corporate Governance Implementation Report

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Approved by,

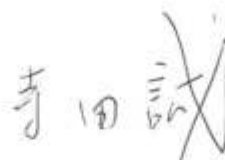
Board of Directors



Sancoyo Setiabudi
President Director



Hajime Jodai
Director



Makoto Terada
Director



Nasiti Evia Lutfi
Director

Board of Commissioners



Diwe Novara
President Commissioner



Philippe Vezio
Commissioner

Agustino Sidabutar
Independent Commissioner

Linda Juliana JL Delhaye
Independent Commissioner

2021 Good Corporate Governance Implementation Report

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Approved by,

Board of Directors



Sancoyo Setiabudi
President Director



Hajime Jodai
Director



Makoto Terada
Director



Nasiti Evia Lutfi
Director

Board of Commissioners



Diwe Novara
President Commissioner



Philippe Vezio
Commissioner



Agustino Sidabutar
Independent Commissioner

Linda Juliana JL Delhaye
Independent Commissioner

2021 Good Corporate Governance Implementation Report

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Approved by,

Board of Directors



Sancoyo Setiabudi
President Director



Hajime Jodai
Director



Makoto Terada
Director



Nasiti Evia Lutfi
Director

Board of Commissioners



Diwe Novara
President Commissioner

Philippe Vezio
Commissioner

Agustino Sidabutar
Independent Commissioner



Linda Juliana JL Delhaye
Independent Commissioner